

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2019-2024**

NAMA SKPD	: SEKRETARIAT DAERAH
URUSAN	: Urusan Pemerintahan dan Fungsi Penunjang
TUGAS	: Membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
FUNGSI	: <ol style="list-style-type: none">1. Perumusan rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran Sekretariat Daerah;2. Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;3. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah;4. Pelayanan administratif, data, dan informasi kesekretariatan daerah;5. Pembinaan aparatur sipil negara pada perangkat daerah;6. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;7. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Sekretariat Daerah;8. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah; dan9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)	(4)
Tujuan :			
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	<p>Alasan Pemilihan Indikator : Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) digunakan untuk menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah Sistem AKIP merupakan satu rangkaian siklus manajemen yang meliputi : perencanaan kinerja, perencanaan program/kegiatan, penyusunan anggaran, pelaksanaan Program/kegiatan, pengukuran dan pelaporan keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja, dan pelaksanaan evaluasi internal.</p> <p>Formulasi Pengukuran : Nilai AKIP berdasarkan hasil evaluasi mengacu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Permenpan 12/2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.</p> <p>Satuan : Angka (1-100) dan Huruf</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Sekretariat Daerah</p>
Sasaran :			
1.1	Meningkatnya kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah	Capaian peningkatan kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan ukuran keberhasilan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah.</p> <p>Formulasi Pengukuran: $\frac{(((\text{Jumlah kebijakan yang tidak bermasalah/jumlah kebijakan yang ada (Perda, Perbup, Keputusan Bupati, Peraturan Bersama)) + ((\text{Jumlah kebijakan yang ada/jumlah kebijakan yang seharusnya ada}) \times 100\%)))}{2}$</p> <p>Satuan : Persen</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Sekretariat Daerah</p>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik kesekretariatan Daerah	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Nilai SKM merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.</p> <p>Satuan : Angka (1-100)</p> <p>Formulasi Pengukuran: Hasil Survei Kepuasan masyarakat berdasarkan Permenpan RB nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Untuk Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p> <p>Rmus : ((Total Nilai Persepsi Per Unsur/Total unsur yang terisi)x Nilai Penimbang)</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Sekretariat Daerah</p>

Kota Mungkid, 6 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH



